

Pemekaran Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros 2000-2017

St. Hedi Rahmawati¹, Jumadi², Bustan³

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNM, Sulawesi Selatan

Email: ¹st.hedirahmawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai latar belakang pemekaran, perkembangan Kecamatan Cenrana setelah terjadi pemekaran dan dampak pemekaran Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan tahapan pertama, heuristik yaitu pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kajian pustaka (literatur). Kedua, kritik yaitu seleksi data dengan cara Pengujian mengenai kebenaran dan ketepatan data yang telah dikumpulkan. Ketiga, interpretasi yaitu menafsirkan data dengan memberi penguatan sesuai kebenaran fakta. Keempat, historiografi yaitu menuliskan peristiwa sejarah menjadi cerita utuh. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pemekaran Kecamatan Cenrana didasarkan pada wilayah yang sangat luas dan pertumbuhan penduduk yang meningkat namun sarana dan prasarana yang tidak memadai, pembangunan yang tidak merata dan tertinggal. Setelah pemekaran, peningkatan pelayanan publik membaik, dalam sektor ekonomi utamanya pertanian, sektor pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan. Bagi pemerintah Kabupaten Maros dampak pemekaran ialah mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa, pemekaran kecamatan Cenrana berdampak positif terhadap masyarakat Kecamatan Cenrana dan Pemerintah Kabupaten Maros dari berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kecamatan Cenrana.

Kata Kunci : *Pemekaran, Kecamatan, Cenrana.*

Abstract

This study discusses the background of the division, the development of Cenrana Sub district after the division and the impact of the expansion of the Cenrana Sub district, Maros Regency. This research is analytical descriptive with a qualitative approach. The method used is the historical method with the first stage, heuristics, namely collecting data by observation, interview, literature review. Second, criticism is the selection of data by testing the truth and accuracy of the data collected. Third, interpretation, namely interpreting data by providing reinforcement in accordance with the truth of the facts. Fourth, historiography is to write historical events into whole stories. In this study shows that the background of the division of Cenrana Sub district is based on a very wide area and increased population growth but inadequate facilities and infrastructure, uneven development and lagging. After the division, the increase in public services has improved, in the main economic sectors agriculture, education and health have increased. For the government of Maros Regency the impact of division is to overcome the distance of the range of control between the government and the community, as well as to provide opportunities for the regions to carry out equitable development. It can be concluded that, the expansion of Cenrana sub-district has a positive impact on the people of Cenrana Sub-district and Maros Regency Government from various aspects of community life in Cenrana Sub-district.

Keywords: *Division, Districts, Cenrana*

A. Pendahuluan

Masalah otonomi daerah merupakan hal yang berkembang sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dapat diperluas atau dipersempit tergantung kepada pertimbangan kepentingan nasional dan kebijaksanaan pemerintah. Semuanya dilakukan menurut prosedur ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kajian sistem pemerintahan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974. Desentralisasi merupakan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah hal wewenang dan tanggung jawab. Hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas Daerah. (Noerdin, et al., 1991)

Kemudian hakikat mendasar otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Berkenaan dengan hal itu kepada daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya dan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja. (Wijaya, 2003)

Periode transisi politik setelah jatuhnya rezim Soeharto ditandai oleh beberapa konflik. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pembentukan provinsi-provinsi dan

kabupaten-kabupaten baru yang disebut sebagai proses pemekaran wilayah. Seperti terjadi di Kalimantan Barat, proses pemekaran terjadi setelah adanya konflik komunal. Kabupaten Sambas dipecah menjadi 2 kabupaten yaitu Sambas dan Bengkawang. Sering dikatakan bahwa pemekaran terjadi karena adanya tuntutan masyarakat yang memiliki komposisi etno-demografi berbeda. Sambas didominasi oleh etnis melayu dan Bengkawang dinominasi oleh etnis Dayak. Pemisahan Gorontalo dari Provinsi Sulawesi Utara dan Banten dari Provinsi Jawa Barat dimulai dari adanya perbedaan etno-demografis dari wilayah-wilayah tersebut. (Tirtosudarmo, 2005)

Pemekaran kecamatan merupakan wujud nyata dari adanya otonomi daerah. Pembentukan atau pemekaran suatu daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa alasan, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, keamanan, sosial budaya dan sosial politik. Inilah yang mendorong masyarakat yang dipelopori oleh Daeng Tata Saing dan pemuka masyarakat mengajukan pengusulan pemekaran kecamatan baru dari wilayah Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang luas wilayahnya 362,33 km² guna pemerintah dapat lebih menjangkau dalam pemberian pelayanan publik secara merata kepada seluruh penduduk.

Kantor kecamatan bisa lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah kecamatan dapat lebih maksimal dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, membimbing, memberikan informasi mengenai prosedur pelayanan, dan memberdayakan masyarakat. Pemerintah kecamatan dapat lebih lancar dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. (Fitri & , 2014) Wilayah yang sangat luas, meningkatnya jumlah penduduk, sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal terhadap penduduk. Inilah beberapa alasan sehingga dimekarkan

Kecamatan Cenrana dari Kecamatan Camba.

Kecamatan Cenrana yang terletak di kawasan hutan dan pegunungan memiliki potensi dalam bidang pertanian dan Pariwisata alamnya sehingga tugas pemerintah adalah dengan mengembangkannya. Namun setelah 18 tahun pemekaran masyarakat lebih lekat dengan nama Camba daripada Cenrana. Dan salah satu bukti bahwa kecamatan Cenrana memiliki potensi dalam sumber daya manusia adalah Nurdin Johan yang merupakan bupati pertama Kabupaten Maros berasal dari Kecamatan Cenrana. Selain itu wilayah Kecamatan Cenrana berdomisili penduduk dengan bahasa peralihan bugis Makassar sehingga memiliki bahasa daerah yang berbeda dan terdengar unik dan disebut dengan nama bahasa Dentong.

Pembentukan dan perkembangan Kecamatan Cenrana penting untuk diteliti karena untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan, perkembangan dan dampak yang dirasakan masyarakat setelah pemekaran. Sehingga masyarakat Kecamatan Cenrana dan calon penulis dapat mengetahui sejarah dan perkembangan daerahnya. Inilah menjadi alasan calon penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang Kecamatan Cenrana.

Adapun sumber dan referensi yang ditemukan tentang tulisan pemekaran kecamatan yaitu diantaranya, buku HAW. Widjaja yang berjudul *Titik Berat Otonom Pada Daerah Tingkat II* membahas tentang perwujudan sistem pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan landasan konstitusionalnya yang menjadi titik tumpu bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah. (Wijaya, 2003) Yang kedua, buku yang ditulis oleh Kuntana Magnar, yang berjudul *Pokok-Pokok Pemerintah Otonom dan Wilayah Administratif*, buku ini membahas tentang titik berat otonomi daerah yang diletakkan pada daerah tingkat II serta diwujudkan adanya wilayah administratif (Magnar, 1984).

Adapun jurnal yang menjadi referensi yaitu *Jurnal Masyarakat Dan Budaya, (Dimensi Etno-Politik Pemekaran Wilayah Dan Pilkada)* milik Riwanto Tirtosudarmo yang ditulis tahun 2005. Jurnal ini mengkaji tentang beberapa alasan sehingga terjadinya pemekaran daerah di Indonesia.

Referensi yang lain adalah skripsi yang ditulis oleh Yusriani Yuyun dengan judul *Pembentukan Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju tahun 2000-2015* dan skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah dengan judul *Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima tahun 2001-2014* yang terdapat di Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Yang membahas tentang perjuangan masyarakat mewujudkan pembentukan kecamatan demi kemaslahatan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Setiap ilmu mempunyai metode, tanpa metode kumpulan pengetahuan tentang objek tertentu tidak dapat di katakan sebagai ilmu, sekalipun masih ada syarat lain. Dalam kaidah ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja dan prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode dalam studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis dan mengajukannya secara tertulis. Berdasarkan uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa metode sejarah merupakan cara atau tehnik dalam merekonstruksikan peristiwa masa lampau melalui empat tahap kerja yaitu heuristik, (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/ bahan dan internal/ isi), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan kisah sejarah).

1. Heuristik

Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertamanya yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan

mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa dan cara memperoleh. *Pertama*, sumber tulisan yakni jejak masa lalu yang mengandung informasi dan bentuk tulisan. Tulisannya dapat berupa informasi primer dan sekunder. Informasi primer biasa dikenal dengan pengetahuan tentang peristiwa dari tangan pertama atau langsung dibuat dengan ketika peristiwa itu terjadi. Sumber primer umumnya berupa arsip, catatan perjalanan, risalah sidang, daftar hadir peserta surat keputusan dan sebagainya.

Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen. Dokumen tersebut dapat diperoleh pada lembaga-lembaga khusus yang menangani atau menghimpun arsip atau koleksi perorangan yang belum disimpan pada lembaga terkait. Misalnya Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional di Jakarta dan di Daerah. Khusus pengumpulan terakhir, perlu di ketahuai sejarawan atau peneliti bahwa tidak semua sumber arsip yang dibutuhkan dapat digandakan. *Kedua* sumber tulisan yakni informasi tentang suatu peristiwa baik yang disampaikan secara turun temurun maupun langsung dari pelaku sejarah. Penggunaan oral tradision dalam karya penulisan sejarah apabila tidak ada sumber lisan langsung (oral history) maupun tulisan. Tehnik penggunaan sumber lisan yang langsung pada pelaku sejarah biasa juga disebut sejarah lisan. Penggunaan metode lisan dalam sejarah sangat penting, bagian-bagian yang tidak lengkap dalam bahan dokumen disusun melalui wawancara dengan para pelaku atau saksi. Dan pada tingkat yang mendasar, wawancara dapat merupakan kisah yang menghubungkan catatan-catatan tekstual tersebut. (Hamid & Madjid, 2008)

Dalam melakukan pengumpulan sumber, calon penulis menggunakan dua cara yaitu :

a) Penelitian Pustaka

Dalam penelitian pustaka penulis mengumpulkan sumber-sumber tertulis baik itu buku, data tertulis, skripsi, jurnal

yang relevan dengan topik penelitian ini. Bahan-bahan pustaka tersebut penulis peroleh dari perpustakaan jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Perpustakaan Umum Universitas Negeri Makassar, Perpustakaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros dan arsip kantor Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

b) Penelitian Lapangan

Kegiatan ini berupa pengumpulan data secara langsung terhadap obyek yang menjadi sasaran penelitian berupa Observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti dalam hal ini Kecamatan Cenrana di Kabupaten Maros dan segala sesuatu yang berkenaan dengan obyek penelitian.

Selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara terhadap orang yang dianggap berkompeten dalam objek yang akan diteliti. Wawancara akan dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat pengagas pemekaran Kecamatan Cenrana maupun Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda yang terlibat.

2. Kritik

Dalam usaha mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Sehubungan dengan segala kemungkinan di atas, untuk dapat memutuskan ini semua, sejarawan harus mengerahkan segala kemampuan pikirannya, bahkan seringkali ia harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu, percaya begitu saja, menggunakan akal sehat, dan melakukan tebakan intelegen. Itulah fungsi kritik sehingga karya sejarah merupakan produk dari suatu proses ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi atau fabrikasi sejarawan. Kritik umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran dan ketepatan. Dalam metode sejarah dikenal

dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal.

a) Kritik Eksternal

Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Kritik ekstern adalah langkah-langkah meneliti atau menguji apakah dokumen-dokumen atau sumber-sumber sejarah yang didapatkan otentik atau asli, utuh, atau sudah banyak mengalami perubahan, bahkan mungkin palsu..

b) Kritik Intern

Tahap ini untuk meneliti sumber yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian dan laporan hasil penelitian. Setelah menetapkan sebuah teks outentik dan menemukan apa yang sungguh-sungguh ingin di katakan oleh pengarang maka sejarawan baru menetapkan apakah kesaksian tersebut kredibel.

3. Interpretasi

Pada tahap ini sumber atau data sejarah yang telah diseleksi dapat digunakan sebagai sumber atau bahan penulisan sejarah, namun sumber tersebut masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut yang dikenal dengan interpretasi (penafsiran). Dalam tahap ini penulis dituntut untuk bisa menghasilkan interpretasi yang tidak memihak dan sesuai dengan kebenaran fakta yang ada karena unsur subjektivitas terkadang dapat mempengaruhi isi penulisan. Hal ini dimaksud untuk memberi arti terhadap aspek yang diteliti, mengaitkan fakta yang satu dengan fakta lainnya agar ditemukan kesimpulan penulisan ilmiah.

4. Historiografi

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini peneliti akan menuliskan peristiwa sejarah tersebut dalam sebuah tulisan yang dalam penulisan, pemaparan dan pelaporan menggunakan tata cara tertentu. Dimana dalam hal ini, penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian dengan kajian kepustakaan dan lapangan. Penulisan sejarah merupakan proses penjelasan dari semua kegiatan dalam proses penelitian

sejarah. (Sjamsuddin, 2012) Pada tahap ini penulis mencoba untuk menggambarkan hasil penelitiannya. Dalam hal ini pada penelitian tentang Sejarah dan Perkembangan Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros pada tahun 2000 sampai 2017.

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Kecamatan Cenrana

Kecamatan Cenrana adalah Kecamatan yang terletak di kawasan hutan dan pegunungan. Secara administrasi wilayah Kecamatan Cenrana berbatasan langsung dengan wilayah sebelah barat Kabupaten Pangkep, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Simbang dan sebelah utara berbatasan Kecamatan Camba.

Pusat pemerintahan Kecamatan Cenrana terletak di Bengo, Desa Limampocoe yang berjarak 34 km dari ibukota Kabupaten Maros. Penduduk di Kecamatan Cenrana sebagian besar bermata pencaharian petani sehingga berdampak pada luasnya penggunaan lahan untuk sawah, tegal/kebun dan ladang/huma. Komposisi penggunaan lahan pertanian di wilayah Kecamatan Cenrana antara lain untuk lahan persawahan 2001 Ha, lahan bukan sawah yang diusahakan untuk pertanian 8363 Ha dan lahan untuk bangunan dan pemukiman 3216 Ha. Di Kecamatan Cenrana, terdapat sebuah sungai yang berair sepanjang tahun, sungai tersebut adalah sambungan Sungai Walanae. Pada saat musim hujan debit airnya rata-rata besar sehingga sering menimbulkan banjir yang melanda areal persawahan serta pemukiman di sekitarnya.

Kebudayaan adalah hasil dari pikiran pikiran manusia atau masyarakat yang ditimbulkan dari rasa, karsa dan karya yang dimanifestasikan dari satu kesatuan dari sistem gagasan yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan suatu masyarakat di wilayah tertentu yang diwarisi secara turun temurun di tengah-tengah

masyarakat yang menghuni wilayah tertentu (Faisal, 1996).

Kondisi hubungan sosial pada masyarakat yang ada di Kecamatan Cenrana tingkat kepeduliannya yang tinggi terhadap sesama dan tetap mempertahankan budaya gotong royong. Hampir setiap kegiatan sosial kemasyarakatan selalu melibatkan pemerintah, tokoh pemuda, pemuda adat dan sebagainya. Sehingga koordinasi antar sesama dalam masyarakat menimbulkan kesadaran sosial masyarakat Kecamatan Cenrana.

Daerah Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah batas atau peralihan. Dikatakan demikian karena mayoritas jumlah penduduk yang mendiami hampir sama jumlah Suku Bugis dan Suku Makassar. Perbedaan itu dapat dilihat dari dialek bahasa yang digunakannya dan juga atas pengakuan mereka tentang asal keturunannya seperti Bone, Gowa Wajo atau Soppeng. Pada umumnya penduduk daerah Kabupaten Maros menggunakan Bahasa Makassar dan Bugis. Hal ini pula yang menyebabkan adanya sub Bahasa Bugis Makassar, yang pada akhirnya Masyarakat Kecamatan Cenrana mengalami peralihan bahasa dan membentuk dialeg bahasa yang baru. Masyarakat Kecamatan Cenrana menyebutnya Bahasa Dentong yang berarti penyatuan dua bahasa.

2. Pembentukan Kecamatan Cenrana

Kecamatan Cenrana menjadi Kecamatan Pembantu di tahun 1999. Kecamatan Cenrana yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Camba memiliki wilayah administrasi yang lebih luas. Sebelum pemekaran, total luas wilayah Kecamatan Camba yaitu 326,33 Km². Setelah pemekaran kecamatan Camba menjadi 145,36 km² dan luas wilayah Kecamatan Cenrana 180,97 km².

Desentralisasi merupakan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah hal wewenang dan tanggung jawab. Hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang

menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di revisi dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dengan nama yang sama merupakan peluang untuk memekarkan Kecamatan Cenrana.

Pemekaran wilayah yang terjadi selama ini didasari oleh ketidakjangkauan pemerintahan dalam menjalankan fungsi fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah kependudukan dan bertambahnya jumlah penduduk setempat yang menghuni wilayah otonomi maupun perpindahan penduduk serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, bahkan jalan penghubung antar Desa sangat terhambat dan beberapa jalanan yang belum layak dilewati kendaraan roda dua apalagi roda empat, sehingga masyarakat mengeluhkan pemekaran.

Tokoh penggagas Kecamatan Cenrana berasal dari berbagai kalangan. Semua kepala desa yang akan menjadi bagian wilayah Kecamatan Cenrana ikut terlibat yaitu Andi Umar S.Sos kepada Desa Limampocoe, Haji Andi Tajalling kepala Desa Baji Pamai, Andi Enre Nai kepala Desa Cenrana Baru, Sitti Hawang kepala Desa Lebbo Tenggae, Bahring kepala Desa Rompegading, Andi Muhlis Puang Sitaba kepala Desa Lebbo Tenggae, Hasbullah kepala Desa Laiya. Dan beberapa tokoh masyarakat seperti Daeng Tata Saing, Puang Lewa, Puang Bare dan beberapa tokoh masyarakat lainnya serta organisasi masyarakat.

Pembentukan Kecamatan Cenrana adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna. Pembentukan Kecamatan Cenrana tidak terlepas dari adanya aspirasi dari masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang merata sesuai dengan amanat pancasila poin ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tuntutannya

adalah mengindonesiakan Indonesia dalam pemaknaannya adalah mewujudkan cita-cita bersama.

Pada saat rapat pembentukan Kecamatan baru, salah satu yang lama diperdebatkan adalah masalah nama. Ada empat kandidat nama yang menjadi pilihan yaitu, Lebbo Tengngae, Watang Bengo, Bulu dan Cenrana. Semua nama yang disodorkan memiliki makna sejarah terhadap daerah di sini. (Tompo, 2019)

Keempat nama ini masing-masing memiliki penguatan untuk dijadikan nama Kecamatan baru. Nama Lebbo Tengngae menjadi salah satu pilihan nama dengan alasan negeri-negeri pegunungan yang meliputi Camba, Laiya, Bengo, Mallawa, Cenrana, Labuaja dan Balocci yang kemudian disebut Lobbotenggae pada awal abad ke XVII (Mustara, 1983/1984), menurut istilah Lobbotenggae berasal dari dua kata yaitu, Lobbo yang berarti lubang dan tenggae yang berarti tengah mewakili keadaan geografis negeri-negeri wilayah Lobbo Tenggae yang berada di dataran yang rendah diantara bukit-bukit yang tinggi (Tahir, 2019). Namun nama ini tidak dapat dijadikan nama Kecamatan karena telah ada Desa dengan nama yang sama di wilayah yang akan menjadi salah satu Desa di Kecamatan Cenrana. Pilihan nama kedua adalah Watang Bengo dengan alasan nama Watang Bengo merupakan wilayah yang akan menjadi ibu kota Kecamatan jika telah dimekarkan, selain itu nama Bengo juga merupakan salah satu kerajaan yang pernah ada di zaman kerajaan. Dan pilihan nama ketiga adalah nama Bulu dengan alasan setelah terjadinya peperangan antara kerajaan Bengo dan Samata yang kemudian dimenangkan oleh kerajaan Samata, maka yang memerintah di kerajaan Bengo adalah utusan Karaeng Samata yang kemudian diberi Gelar karaeng Bulu. Nama keempat adalah Cenrana dan merupakan kandidat yang paling kuat. Secara istilah Cenrana berasal dari nama pohon yaitu Cendana yang merupakan pohon kayu yang sangat tinggi nilai sebagai bahan bangunan istana dan warangka keris dan badik. Secara

historis Cenrana merupakan salah satu kerajaan yang berada di Wilayah Lobbotenggae. Kemudian pada saat pemerintahan Belanda telah masuk ke wilayah Lobbotenggae, terjadi perubahan luas wilayah pada kerajaan Cenrana. Karaeng Labuaja yang bernama Petta Cella memilih turun tahta daripada ditaklukkan Pemerintahan Belanda, hal ini membuat Karaeng Cenrana yang bernama Karaeng Barakkeanna mengambil alih wilayah kekuasaan Karaeng Labuaja, sehingga daerah kekuasaan karaeng Cenrana semakin luas. dan hampir semua wilayah Kecamatan Cenrana saat ini merupakan wilayah kerajaan Cenrana. Ini menjadi alasan terkuat sehingga nama Cenrana dijadikan nama Kecamatan baru.

Pada tahun 1999 Kecamatan Cenrana sebagai kecamatan pembantu dibentuk secara tidak langsung menunjukkan keyakinan, bahwa pembentukan wilayah mampu membawa tingkat kesejahteraan yang lebih baik kedepannya untuk kemajuan daerahnya, walaupun pada awal setelah Kecamatan Cenrana berstatus definitif di tahun 2000, kantor Camat harus menumpang di kantor Desa Limampocoe selama lebih dari 4 tahun. Pada tahun 2004 pembangunan Kantor Camat Cenrana dilakukan yang bertempat di Desa Limampocoe. (Tompo, 2019)

Setelah pemekaran, jumlah desa di Kecamatan Cenrana ada 7 yaitu Desa Laiya dengan luas 63,13 km², Desa Cenrana Baru dengan luas 31,13 km², Desa Limampocoe dengan luas 23,37 km², Desa Labuaja dengan luas 21,45 km², Desa Rompegading dengan luas 17,97 km², Desa Lebbotenggae dengan luas 15,67 km². Dan Desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Baji Pamai dengan luas 7,55 km². Dengan total luas wilayah kecamatan Cenrana 180, 97 km². Desa Limampocoe dan Desa Laiya memiliki 7 dusun, Desa Baji Pamai dan Cenrana Baru memiliki 5 dusun, Desa Rompegading memiliki 4 dusun, Desa Labuaja dan Lebbotenggae memiliki 3 dusun. Sehingga total dusun di Kecamatan Cenrana berjumlah 34 dusun.

3. Dampak Pemekaran Kecamatan Cenrana

Gagasan pembentukan kecamatan Cenrana pada tahun 1999 yang kemudian berstatus definitif pada tahun 2000 sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Sebelum pemekaran, pelayanan publik sangat kurang, transportasi sangat kurang, jalanan tidak diaspal dan beberapa tidak dapat dilalui kendaraan roda dua apalagi roda 4. Jumlah sekolah yang kurang, bahkan sekolah tingkat menengah atas tidak ada sama sekali sehingga masyarakat harus menyekolahkan anaknya di kecamatan lain. ketersediaan fasilitas kesehatan juga tidak memadai, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sangat susah dijangkau karena jaraknya yang jauh.

Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran. Apabila kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik, maka secara tidak langsung hal ini berpengaruh kepada akses masyarakat terhadap pelayanan publik, baik pendidikan maupun kesehatan. Di sisi lain, pelayanan publik juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi umum daerah itu sendiri.

Setelah pemekaran, peningkatan pelayanan publik membaik, dalam sektor pendidikan mengalami peningkatan dengan pembangun sekolah baru mulai dari tingkat Anak Usia Dini hingga sekolah menengah atas atau sederajat. Dalam sektor kesehatan terus mengalami peningkatan, dengan penambahan infrastruktur setiap desa dan jumlah tenaga medis yang bertambah sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Cenrana meningkat.

Optimalnya pelayanan publik di daerah pemekaran disebabkan tersedianya tenaga layanan publik dan efektifnya pemanfaatan pelayanan publik. Oleh karena itu, dampak pemekaran daerah terhadap penyediaan pelayanan publik sangat baik bagi masyarakat pasca pemekaran. Secara

umum, pemekaran wilayah menumbuhkan harapan akan perubahan ke arah yang lebih baik khususnya dalam hal pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, maupun hal-hal lain yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan rentang kendali, didapat bahwa jangkauan jarak pelayanan yang relatif lebih dekat memberikan dampak positif terhadap rentang kendali.

D. Kesimpulan

Pemekaran wilayah di Kecamatan Camba menjadi kecamatan baru yaitu Kecamatan Cenrana didasari oleh ketidakjangkauan pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah kependudukan dan bertambahnya jumlah penduduk setempat yang menghuni wilayah otonomi maupun perpindahan penduduk serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, bahkan jalan penghubung antar desa sangat terhambat dan beberapa jalanan yang belum layak dilewati kendaraan roda dua apalagi roda empat, sehingga masyarakat mengeluhkan pemekaran.

Perkembangan Kecamatan Cenrana dimulai pada tahun 2000 setelah berstatus definitif, kantor Camat harus menumpang di kantor Desa Limampocoe selama kurang lebih 4 tahun. Pada tahun 2004 pembangunan Kantor Camat Cenrana dilakukan yang berlokasi di Desa Limampocoe. Dalam masa 17 tahun, perkembangan dari berbagai aspek dapat dilihat, mulai dari perekonomian yang meningkat, pendidikan merata, kesehatan tambah baik dan bidang pariwisata yang bertumbuh pesat.

Dampak setelah pemekaran yaitu peningkatan pelayanan publik membaik, dalam sektor pendidikan mengalami peningkatan dengan pembangun sekolah baru mulai dari tingkat Anak Usia Dini hingga sekolah menengah atas atau sederajat. Dalam sektor kesehatan terus mengalami peningkatan, dengan penambahan infrastruktur setiap desa dan

jumlah tenaga medis yang bertambah sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Cenrana bertambah baik. Bagi pemerintah Kabupaten Maros untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, 1996. *Integrasi Nasional dalam Hubungan Antara Suku Bangsa dan Sistem Nilai Budaya Nasional*. Sulawesi Selatan: Cv Maju Jaya Ujung Pandang.
- Fitri, L. S. E. & d., 2014. Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan. *Administrasi Publik (JAP)*, Volume I, p. 122.
- Hamid, A. R. & Madjid, M. S., 2008. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Magnar, K., 1984. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom Dan Wilayah Administratif*. Bandung: Cv. Armico.
- Mustara, D. R., 1983/1984. *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Sjamsuddin, H., 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sujanto, N. A. & Sumarno, 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir, D., 2019. *Wawancara* [Wawancara] (27 juni 2019).
- Tirtosudarmo, R., 2005. Dimensi Etno-Politik Pemekaran Wilayah Dan Pilkada. *Masyarakat dan Budaya*, Volume VII, p. 24.
- Tompo, A. U. P., 2019. *Pembangunan Kantor* [Wawancara] (23 Juni 2019).
- Wijaya, H., 2003. *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.